

## Peran dan Tantangan DPR-RI dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia

Gusma Yetry Jelly<sup>1\*</sup>, Ednawan Prihana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staf Ahli DPR-RI, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: \*[a.mulyana84@gmail.com](mailto:a.mulyana84@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received Januari 10, 2025

Revised Januari 15, 2025

Accepted Januari 20, 2025

Available online Januari 24, 2025

**Kata Kunci:**

DPR-RI, Dinamika, Demokrasi,  
Sistem Politik Indonesia

**Keywords:**

DPR-RI, Dynamics, Democracy,  
Indonesian Political System

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fokus utama penelitian ini mencakup isu-isu seperti korupsi, etika, dan dinamika sistem politik Indonesia yang memengaruhi pengambilan keputusan serta pembentukan kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR-RI menghadapi tantangan signifikan, termasuk pergeseran prioritas politik, kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, serta keterbatasan dalam akses dan literasi digital di kalangan anggotanya. Selain itu, perlunya penguatan hubungan antarfraksi dan peningkatan kapasitas analisis anggota DPR-RI menjadi kunci untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi, serta perlindungan data

pribadi melalui kebijakan keamanan siber yang ketat. Saran yang diberikan mencakup pelatihan berkelanjutan bagi anggota DPR-RI dalam memanfaatkan teknologi dan mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DPR-RI dapat berfungsi lebih efektif dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### ABSTRACT

*This study aimed to analyze the role and challenges faced by the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (DPR-RI) in carrying out its functions as a representative institution. The main focus of this research included issues such as corruption, ethics, and the dynamics of the Indonesian political system that influenced decision-making and policy formation. The method used was a qualitative approach, with primary data collected through in-depth interviews and secondary data from literature studies. The results indicated that the DPR-RI faced significant challenges, including shifts in political priorities, the need to improve communication with the public, and limitations in access and digital literacy among its members. Additionally, strengthening inter-faction relationships and enhancing the analytical capacity of DPR-RI members became key to achieving consensus in decision-making. This study also emphasized the importance of transparency and accountability in the legislative process, as well as the protection of personal data through strict cybersecurity policies. Recommendations included ongoing training for DPR-RI members in utilizing technology and encouraging more inclusive public participation. With these measures, it was hoped that the DPR-RI could function more effectively in realizing a democratic government system that was responsive to the needs of the community.*

### PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia merupakan jalan dan mekanisme proyek peradaban yang sangat baik. Namun, demokrasi memerlukan anggaran negara yang besar, belum lagi proses politiknya yang sering kali rentan terhadap praktik transaksional. Politik uang, yang kini marak dipromosikan oleh elite politik, menjadi momok yang membayangi dunia demokrasi akibat tingginya pragmatisme pemilih. Menurut Maulana, Fridawati, & Masruroh (2022), meskipun berbagai pihak telah memberikan sanksi untuk menekan praktik politik transaksional, regulasi dan moralitas politik yang mengikat sering kali diabaikan. Pasca-reformasi, demokrasi di Indonesia telah menjadi lebih terbuka

dan perlahan menunjukkan peningkatan kualitas. Namun, tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa demokrasi masih membutuhkan pencerahan serius karena praktik transaksional terus berkembang dan berubah bentuk, seperti bunglon (Hidayat, 2023).

Sebagai lembaga legislatif utama di Indonesia, DPR-RI memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Hubungan yang kompleks antara DPR-RI dan sistem politik Indonesia menciptakan dinamika yang beragam dan signifikan bagi perkembangan politik nasional (Riskiyono, 2022). DPR-RI juga merupakan arena di mana berbagai partai politik bersaing untuk memperoleh kursi dan kekuasaan legislatif. Hasil pemilu yang diadakan secara berkala memengaruhi komposisi DPR-RI, sehingga perubahan dalam komposisi ini dapat mengubah dinamika politik di lembaga tersebut (Riskiyono, 2022). Dengan demikian, DPR-RI mencerminkan preferensi politik masyarakat dan partai politik yang mereka wakili.

Dalam hal pembentukan kebijakan nasional, DPR-RI memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan kebijakan publik (Riskiyono, 2022). Fraksi-fraksi dan partai politik di dalam DPR-RI berperan dalam menyusun agenda legislatif dan memengaruhi hasil kebijakan yang dihasilkan.

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap DPR-RI menjadi salah satu latar belakang penting untuk dikaji. Pemahaman mendalam tentang penyebab penurunan kepercayaan ini diperlukan, terutama dengan mengeksplorasi kasus-kasus pelanggaran etika dan korupsi yang melibatkan anggota DPR-RI. Penelitian ini bertujuan memahami dampak nyata dari tindakan yang melanggar norma dan hukum terhadap persepsi publik mengenai integritas dan kredibilitas DPR-RI. Analisis lebih lanjut akan mengevaluasi sejauh mana kasus-kasus tersebut memengaruhi kepercayaan publik.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sanksi yang diberikan kepada anggota DPR yang terlibat dalam pelanggaran etika atau korupsi. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas sanksi dalam menjaga akuntabilitas dan integritas lembaga. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah langkah-langkah penegakan hukum yang diambil mampu secara signifikan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR-RI.

Melalui analisis peran dan tantangan DPR-RI, perilaku korupsi dan pelanggaran etika anggota DPR menjadi isu yang tak kalah penting. Korupsi dianggap sebagai penyakit moral yang telah mengakar dalam budaya partai politik di Indonesia. Upaya untuk mengatasi budaya korupsi ini dilakukan melalui strategi preventif, detektif, dan represif. Kode etik DPR, yang diterapkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Namun, kasus-kasus seperti korupsi, bermain game, menonton film porno, tidur saat sidang, atau bolos rapat menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga etika dan moralitas politik anggota DPR.

Dalam rekam jejak DPR, sudah beberapa kali anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setiap anggota tersebut memiliki berbagai kasus, seperti berikut ini:

**Tabel 1.** Anggota DPR yang diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan

No	Anggota DPR	Masalah
1	ES	Diduga bahwa EF telah melanggar Kode Etik ketika menyebut Tentara Negara Indonesia (TNI) seperti grombolan.
2	PM	Diadukan ke MKD karena merayakan ulang tahunnya di tengah aksi penolakan kenaikan harga BBM.
3	SN	Kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden pada kasus yang menjeratnya
4	HM	Menonton video porno saat sedang rapat DPR
5	AK	Diberhentikan dari jabatan Ketua DPR karena mendapat sanksi sedang dari MKD terkait perilaku etik anggota dewan

*Sumber: Tempo, 2022*

Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Salah satu kasus mencolok adalah kasus SN, yang melibatkan drama menghebohkan, termasuk saat SN menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka dan muncul kembali dengan cerita kecelakaan mobil. SN dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda yang signifikan. Contoh lainnya adalah kasus ND, yang terlibat dalam suap terkait pengurusan Surat Persetujuan Impor bawang putih. ND menerima sebagian dari total suap yang dijanjikan dan akhirnya divonis 7 tahun penjara, disertai hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Kasus-kasus tersebut mencerminkan persoalan serius terkait etika dan integritas anggota DPR. Jumlah kasus korupsi yang signifikan menunjukkan tantangan besar dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap DPR-RI.

Survei terbaru yang dirilis oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) mengungkapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga negara di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan pada 13-18 Desember 2023 dengan 1.300 responden dari 34 provinsi (margin of error  $\pm 2,7\%$  dan tingkat kepercayaan 95%) menunjukkan variasi yang mencolok. DPR-RI mencatat tingkat kepercayaan terendah, yaitu hanya 56,2% responden yang menyatakan percaya.

Sebagai perbandingan, TNI memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi dengan 91,2% responden menyatakan percaya. Disusul oleh Presiden dengan 73,8%, Kejaksaan Agung 73,5%, dan Mahkamah Agung 73,5%. Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan dari 67,3% responden, sementara Kepolisian mencatat angka 65,5%. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh tingkat kepercayaan masing-masing 60,4% dan 58,8%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi DPR-RI dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, termasuk persoalan korupsi dan etika, serta mengidentifikasi tantangan DPR-RI dalam pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, dan representasi kepentingan rakyat di tengah dinamika sistem politik Indonesia. Penelitian juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana lemahnya dinamika sistem politik Indonesia memengaruhi peran DPR-RI dalam proses legislasi, pengambilan keputusan, dan pembentukan kebijakan di tingkat nasional.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem Politik Indonesia

Sistem politik, seperti sistem kehidupan lainnya, memiliki kekhasan berupa integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling ketergantungan antarbagian-bagiannya. Sistem politik Indonesia didefinisikan dengan berbagai cara oleh para ahli. Menurut Djufri (2022), sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Lingkungan intra-masyarakat, seperti landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai, turut memengaruhi sistem politik Indonesia. Areza, Akbar, Ikhsan, & Nasution (2023) menambahkan bahwa sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, serta seleksi dan penyusunan skala prioritas.

Menurut Sari (2023), sistem politik Indonesia dapat merujuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku saat ini, atau yang berlaku sejak berdirinya negara Indonesia hingga sekarang. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional, serta memperhitungkan kondisi masyarakat secara nyata. Banyak faktor memengaruhi sistem politik Indonesia, termasuk faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Faktor-faktor ini membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik bagi pemegang kekuasaan maupun masyarakat yang dikuasai oleh kekuasaan tersebut.

David Easton menjelaskan bahwa sistem politik adalah sistem interaksi yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia terus berkembang seiring pengaruh lingkungan internal dan eksternal, yang membentuk perilaku politik di berbagai tingkatan kekuasaan. Namun, tantangan besar masih ada, termasuk dalam memastikan sistem politik yang stabil, representatif, dan berintegritas tinggi.

### Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan merupakan gagasan untuk memisahkan organ, fungsi, dan lembaga negara ke dalam beberapa bagian yang mandiri. Setiap bagian menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai hukum yang mengaturnya. Doktrin ini dikenal sebagai *Trias Politica*, yang dikembangkan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris, dan Montesquieu, seorang pemikir dari Perancis. *Trias Politica* membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan tujuan utama mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan teori *Trias Politica* dengan penyesuaian sesuai kebutuhan. Menurut Zulfan (2018), kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang dan diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eksekutif bertanggung jawab melaksanakan undang-undang, dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sementara itu, kekuasaan yudikatif bertugas menegakkan hukum, diwakili oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kekuasaan ini.

Namun, penerapan *Trias Politica* tidak selalu mutlak di Indonesia. Misalnya, dalam proses legislasi, tidak semua undang-undang dihasilkan oleh DPR, karena pemerintah juga memiliki peran penting, terutama dalam penyusunan undang-undang anggaran negara. Undang-undang tersebut disiapkan oleh pemerintah dan hanya memerlukan persetujuan dari DPR. Tantangan implementasi

sistem demokrasi dan Trias Politica di Indonesia sering menimbulkan gejolak politik. Kasus-kasus seperti ini memerlukan kajian mendalam dari para ahli hukum tata negara untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.

Pada praktiknya, pelaksanaan teori ini membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga negara. Kesetaraan kedudukan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi prinsip yang harus dijaga untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan efektif. Meski begitu, masih terdapat tantangan besar, seperti potensi pelanggaran wewenang, kurangnya transparansi, dan rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan sistem politik yang berbasis integritas, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi dan dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks tertentu. Penelitian kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif, yang menghubungkan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Meskipun lebih menitikberatkan pada kedalaman analisis, pendekatan kualitatif tetap dapat menggunakan dukungan data kuantitatif untuk memperkuat hasil penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengembangkan sensitivitas terhadap permasalahan yang dihadapi, menjelaskan realitas, serta menghasilkan teori berbasis data yang ditemukan di lapangan (Creswell, 2014).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara mendalam untuk memahami peran, kekuatan, dan tantangan DPR-RI dalam dinamika sistem politik Indonesia. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup informasi dari buku, artikel ilmiah, serta sumber daring yang relevan. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa purposive sampling dipilih karena informan dianggap mengetahui atau memiliki pengalaman yang relevan dengan objek penelitian, sehingga dapat memberikan data yang akurat dan mendalam. Informan yang dipilih dalam penelitian ini mencakup anggota DPR RI, akademisi, dan analis politik, seperti H. Alamuddin Dimiyati Rois, Dr. Wawan Mas'udi, dan Adi Prayitno.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih, dan menyaring data penting dari hasil wawancara maupun observasi, sehingga memberikan gambaran yang jelas untuk tahap analisis selanjutnya. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi untuk mempermudah interpretasi. Tahap akhir adalah pengambilan kesimpulan, yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antar data serta informasi dari informan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu penggabungan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, guna meningkatkan validitas hasil penelitian (Sugiyono, 2019). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu

memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sistem politik Indonesia dan peran DPR-RI di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran dan Tantangan DPR-RI sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat

#### 1. Peran dan Tantangan Adaptasi

Perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau partai politik dapat menciptakan ketidakpastian bagi DPR-RI. Tantangan ini melibatkan kemampuan DPR-RI untuk dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan tanpa mengabaikan tugas utamanya. Lembaga ini perlu memiliki mekanisme dan tim analisis yang andal untuk mengkaji dampak perubahan kebijakan. Hal tersebut akan memastikan DPR-RI tetap relevan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat.

#### 2. Pergeseran Prioritas

Salah satu tantangan utama DPR-RI adalah menjaga fleksibilitas dalam menyusun agenda politik dan merespons isu-isu mendesak. DPR-RI harus mampu mengidentifikasi perubahan prioritas dan menanggapinya dengan kebijakan yang tepat. Ini membutuhkan evaluasi terus-menerus terhadap isu-isu yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga fokus pada kepentingan publik.

#### 3. Komunikasi yang Efektif

Untuk menghadapi tantangan adaptasi, DPR-RI perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Menyampaikan informasi yang jelas mengenai perubahan kebijakan atau prioritas politik dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat membantu DPR-RI memahami harapan rakyat serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka.

HDR, anggota DPR-RI 2019–2024, menyatakan:

*"Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. DPR-RI perlu merancang strategi komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami untuk menyampaikan perubahan kebijakan atau prioritas politik. Keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan juga akan meningkatkan legitimasi keputusan politik."*

#### 4. Meningkatkan Kapasitas Analisis

Peningkatan kapasitas analisis anggota DPR-RI melalui pendidikan dan pelatihan merupakan langkah penting untuk memahami dampak perubahan politik secara mendalam dan mengambil keputusan yang terinformasi. Kolaborasi dengan lembaga riset independen dapat memberikan wawasan dan analisis yang komprehensif.

#### 5. Penguatan Hubungan Antarfraksi

Penguatan hubungan antarfraksi di DPR-RI menjadi kunci dalam mencapai konsensus saat menghadapi dinamika politik. Tantangannya adalah bagaimana mengatasi perbedaan pendapat dan memprioritaskan kepentingan nasional. Keterampilan diplomasi dan negosiasi anggota DPR-RI perlu ditingkatkan untuk mendukung tercapainya kesepakatan bersama.

## **Tantangan Teknologi dan Informasi bagi DPR-RI**

### **1. Tantangan Teknologi**

Sebagian anggota DPR-RI menghadapi keterbatasan dalam akses dan literasi digital. Hal ini memerlukan inisiatif untuk memberikan pelatihan dan dukungan agar semua anggota mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain itu, DPR-RI harus memastikan infrastruktur teknologi yang mendukung kegiatan legislatif dan pengawasan tetap terpelihara. Pemeliharaan perangkat keras dan lunak yang memadai sangat penting untuk menjamin kelancaran operasional lembaga ini.

### **2. Keamanan dan Privasi**

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data menuntut adanya kebijakan yang ketat untuk melindungi data pribadi anggota DPR-RI dan masyarakat. Pembangunan sistem keamanan yang kuat menjadi prioritas untuk mencegah ancaman siber. Investasi dalam sistem perlindungan siber yang canggih diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan legislatif dan pengawasan.

AP, seorang analis politik, menyatakan:

*"Dalam era teknologi, keamanan dan privasi data menjadi sangat penting. DPR-RI perlu mengembangkan kebijakan yang mampu melindungi data pribadi anggota dan masyarakat. Investasi dalam sistem keamanan siber yang unggul akan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman yang semakin kompleks."*

### **3. Transparansi dan Akuntabilitas**

Menyajikan informasi secara terbuka kepada publik menjadi tantangan tersendiri. DPR-RI perlu mengembangkan platform yang memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait keputusan dan proses legislatif. Selain itu, mekanisme audit dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan teknologi diperlukan untuk menjamin efektivitas dan keamanan sistem yang digunakan.

### **4. Pelibatan Publik dan Partisipasi Online**

Keterbatasan akses internet yang merata di Indonesia menciptakan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat. DPR-RI perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan akses yang lebih inklusif. Menyediakan platform partisipasi online yang responsif dan mudah diakses dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

### **5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota DPR-RI terkait teknologi menjadi hal yang krusial. Program pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu anggota DPR-RI memanfaatkan teknologi secara efektif dalam mendukung tugas legislatif dan pengawasan. Selain itu, staf pendukung juga harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menunjang penggunaan teknologi secara optimal.

## **Tantangan Korupsi dan Peran Penguatan Integritas DPR-RI**

DPR-RI menghadapi tantangan besar dalam mencegah dan memberantas korupsi, salah satunya melalui penguatan tata kelola. Menyusun dan menegakkan kode etik yang kuat menjadi langkah awal untuk mencegah perilaku koruptif. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi anggota DPR-RI terkait pencegahan korupsi, seperti etika politik, tata kelola keuangan, dan peraturan anti-korupsi, sangat diperlukan. Selain itu, peran pengawasan internal juga menjadi

krusial. Lembaga pengawas internal harus mampu beroperasi secara independen tanpa pengaruh politik atau kepentingan pribadi, dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang transparan. Insentif bagi petugas pengawas juga diperlukan agar mereka dapat tegas dalam melaporkan potensi korupsi. Pemantauan sumber daya dan anggaran DPR-RI merupakan tantangan penting lainnya. Transparansi dalam penggunaan anggaran serta keterlibatan lembaga audit eksternal menjadi strategi untuk memastikan akuntabilitas. Di sisi lain, pemberantasan praktik gratifikasi dan nepotisme harus menjadi fokus utama, dengan aturan yang ketat dan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Pemberlakuan kebijakan anti-nepotisme, seperti melarang penempatan anggota keluarga dalam posisi strategis, juga menjadi langkah penting. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan DPR-RI perlu ditingkatkan melalui transparansi dan akses informasi yang mudah. Selain itu, mekanisme perlindungan bagi whistleblower harus disediakan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka yang melaporkan tindak korupsi.

### **Tantangan Etika dan Profesionalisme DPR-RI**

Dalam meningkatkan etika dan profesionalisme, DPR-RI menghadapi tantangan utama berupa penguatan dan penegakan kode etik yang berlaku. Kode etik harus mencerminkan standar tinggi etika dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Transparansi dalam proses penegakan kode etik menjadi penting agar masyarakat memiliki keyakinan terhadap integritas lembaga ini. Kemandirian anggota juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan rutin tentang nilai moral, tanggung jawab publik, dan penghindaran konflik kepentingan. Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan dan penempatan anggota DPR-RI juga menjadi tantangan. Proses pemilihan harus didasarkan pada kualifikasi, integritas, dan rekam jejak profesional tanpa melibatkan praktik nepotisme. Penempatan anggota dalam posisi strategis juga perlu dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan lembaga, dengan mekanisme seleksi yang transparan. Akuntabilitas terhadap publik menjadi hal penting dalam menjalankan fungsi perwakilan. DPR-RI perlu menjelaskan keputusan dan tindakan mereka dengan cara yang mudah dipahami masyarakat serta secara aktif berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan publik, seperti forum diskusi dan respons terhadap umpan balik. Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran etika sering kali menghadapi tantangan politisasi. Untuk mengatasi ini, DPR-RI perlu mengembangkan mekanisme independen dalam pemberian sanksi, termasuk melibatkan partisipasi publik dalam penilaian etika anggota, guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

### **Dinamika Sistem Politik Indonesia**

Pluralitas politik di Indonesia, yang tercermin dalam keberagaman partai politik dan pandangan politik masyarakat, merupakan ciri khas dinamika sistem politik. Keberagaman ini memiliki dampak signifikan terhadap peran DPR-RI dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan di tingkat nasional. Keberagaman partai politik di DPR-RI menciptakan tantangan dalam mencapai konsensus. Fraksi-fraksi yang beragam cenderung memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu-isu tertentu, sehingga diperlukan negosiasi intensif untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Adanya fraksi-fraksi dengan kepentingan yang beragam dapat menyulitkan upaya menyatukan suara DPR-RI, yang seringkali menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan yang dapat memperoleh dukungan luas.

Menurut AP, seorang pakar politik, dinamika pluralitas politik yang tercermin dalam temuan penelitian ini adalah cerminan nyata dari tantangan yang dihadapi DPR-RI. AP menyatakan,

"Pluralitas politik yang begitu kaya di Indonesia adalah kekayaan yang memperkaya, namun juga menjadi ujian bagi kemampuan DPR-RI dalam mencapai konsensus. Proses negosiasi intensif antara fraksi-fraksi yang beragam menjadi hal yang tidak terhindarkan, dan ini menunjukkan sejauh mana perwakilan politik dapat mengelola keberagaman untuk merumuskan kebijakan yang bertahan."

Pemimpin fraksi memiliki peran kunci dalam meredam ketegangan antarpolisi dan memfasilitasi dialog antarfraksi. Keberagaman politik menuntut kepemimpinan yang efektif untuk mencapai kesepakatan. Pemimpin fraksi perlu memastikan penyalarsan pandangan di dalam fraksi masing-masing, sekaligus berupaya untuk mencapai kesepakatan lintas-fraksi.

Menurut HDR, Anggota DPR RI 2019-2024, peran pemimpin fraksi menjadi sangat strategis dalam mengelola keragaman pandangan di DPR-RI. HDR menyatakan, "Pemimpin fraksi tidak hanya menjadi perantara antara anggota fraksi dengan pimpinan partai, tetapi juga penentu kunci dalam mencapai kesepakatan lintas-fraksi. Kepemimpinan yang efektif akan membuka ruang untuk dialog terbuka dan konstruktif, meredam ketegangan, serta memastikan fraksi-fraksi dapat bersinergi dalam pembentukan kebijakan."

Pembentukan koalisi antarpolisi dalam sistem politik Indonesia menciptakan dinamika yang memiliki dampak signifikan pada peran DPR-RI dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan di tingkat nasional. Dinamika ini membawa kekuatan dan tantangan yang perlu dipahami secara mendalam. Koalisi politik memungkinkan partai-partai untuk mendukung kebijakan bersama, menciptakan kesatuan dalam merumuskan dan mendukung kebijakan nasional. Hal ini dapat memperkuat posisi DPR-RI dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Koalisi juga dapat mencerminkan keragaman pandangan politik di masyarakat, memberikan representasi yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan. Pembentukan koalisi dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan dengan memiliki dukungan yang kuat di DPR-RI, yang dapat membantu kelancaran implementasi kebijakan.

Menurut HDR, Anggota DPR RI 2019-2024, kekuatan koalisi politik adalah cerminan dari dinamika inklusif dalam sistem politik. HDR menyatakan, "Koalisi politik memiliki peran besar dalam mewujudkan representasi yang lebih menyeluruh. Dalam sistem politik yang penuh keberagaman seperti Indonesia, koalisi memungkinkan berbagai pandangan untuk bersatu, menciptakan kesatuan yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas isu-isu nasional."

Sementara itu, AP, Analisis Politik, memberikan perspektif mengenai kekuatan stabilisasi koalisi politik. Menurutnya "Keberadaan koalisi dapat menghasilkan dukungan yang kuat di DPR-RI, memberikan stabilitas pemerintahan, dan memudahkan implementasi kebijakan. Ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kesepakatan dan representasi berbagai kepentingan politik."

### **Tantangan dalam Koalisi Politik**

Pergeseran koalisi politik dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Perubahan struktur koalisi dapat berdampak pada perubahan arah kebijakan, bahkan di tengah implementasi kebijakan yang sedang berlangsung. Menjaga kesatuan dalam koalisi memerlukan koordinasi yang efektif antarpolisi. Ketidakepakatan dalam hal tertentu dapat menghambat proses pembuatan kebijakan. Proses negosiasi dan kompromi di dalam koalisi seringkali kompleks. Partai-partai harus bersedia untuk mengorbankan beberapa agenda mereka demi mencapai kesepakatan, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan aspirasi pemilih masing-masing.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antarpantai dalam koalisi guna meminimalkan potensi ketidakstabilan dan mengoptimalkan dukungan terhadap kebijakan yang dihasilkan. Perlu juga disusun strategi untuk mengelola pergeseran dalam koalisi, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan yang sedang diterapkan. Selain itu, memastikan transparansi dalam proses negosiasi dan keputusan koalisi, serta mempertahankan akuntabilitas terhadap pemilih dan masyarakat, menjadi hal yang sangat krusial.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPR-RI memiliki peran yang krusial dalam dinamika sistem politik Indonesia, namun menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan antarfraksi, keterbatasan akses teknologi, dan kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan anggotanya. Penguatan hubungan antarfraksi dan keterampilan diplomasi anggota DPR-RI sangat penting untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Selain itu, perlunya kebijakan yang ketat dalam pengelolaan data dan keamanan siber menjadi prioritas untuk melindungi informasi sensitif.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pelatihan dan dukungan bagi anggota DPR-RI dalam memanfaatkan teknologi secara optimal, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga riset independen dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan analisis yang komprehensif terhadap isu-isu yang dihadapi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DPR-RI dapat berfungsi lebih efektif dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1276-1286.  
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/769>
- Azis, F. N., & Purnomo, H. (2024). Analisis Hubungan Sebab-Akibat Dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DJUFRI, D. (2022). Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(10), 88-97.  
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4862>
- Faisal, R., Kurniati, Y., & Hernawati, R. A. S. (2023). Application of the Police Code of Ethics in the Ferdy Sambo Case. *Formosa J. Soc. Sci*, 2(4), 667-674.
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 856-864.  
<https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>
- Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 93-100.
- Kurniati, Y., & Maarif, I. (2025). KONFLIK NORMATIF PROGRAM TAPERA TERHADAP HAK EKONOMI PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM KESEJAHTERAAN. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(2).
- Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165-185.
- Nurfadhilah, A., & Kanya, N. (2017). Pengaruh Persepsi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah di PT Pegadaian (Persero). *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 113-121.
- Maulana, G. I. J., Fridawati, P. I., & Masrurroh, H. (2022). Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(8), 751-757. <https://doi.org/10.17977/um063v2i8p751-757>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(2), 190-198.
- Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(03), 1109-1114.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, (2023) Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya-pada-19-Nopember-2023>
- Riskiyono, J. (2022). Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 152-158.
- Sari, L. N., Purnomo, H., & Santoso, E. (2025). TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KASUS PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 93-100.
- Sari, W. J., Kurniati, Y., & Kustiara, I. (2024). Upaya Pekerja Atas Upah Lembur Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *JURNAL RETENTUM*, 6(2), 146-154.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 51-58. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/view/241>
- Sihombing, L. A. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(01), 153-158.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Norms and Ethics in Criminal Justice: Assessing Contemporary Legal Policy. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*, 13(03), 1088-1099.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGERMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. *Jurnal Scientia*, 12(03), 3139-3146.
- Tempo, (2022). Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon, Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1634052/beberapa-anggota-dpr-ini-pernah-diadukan-ke-mkd-termasuk-effendi-simbolon> pada 20 Nopember 2023
- Tsabitah, J. S., Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2023). Ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(6), 1895-1918.
- Yusuf, L. N., Gumilar, M. R. F., Fadillah, F. R., Yusmar, F. F., Rusman, H., Kurniati, Y., & Razak, K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4448-4456.
- Zulfan, Z. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 60-67. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0102.60-67>